



YOGYA TERIMA 4.000 BLANGKO E-KTP

Pemegang Suket Bisa Cetak di Kecamatan

UMBULHARJO (MERAPI) - Kebijakan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) terbatas kini sudah tidak berlaku di Kota Yogyakarta. Hal itu menyusul adanya penerimaan blangko e-KTP dari pemerintah pusat. Masyarakat yang masih memegang surat keterangan (suket) pengganti KTP sementara, bisa mencetak e-KTP di kecamatan sesuai domisili.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengutarakan sudah menerima sebanyak 4.000 blangko e-KTP dari pemerintah pusat. Semulai Kota Yogyakarta mengajukan sekitar 6.000 blangko e-KTP. Blangko e-KTP itu adalah pengadaan baru tahun anggaran 2020.

"Pekan ini kami mulai distribusikan blangko e-KTP ke seluruh kecamatan. Warga yang masih memegang surat keterangan bisa mencetak e-KTP di kecamatan," kata Bram, Jumat (17/1).

Dia menyatakan ketersediaan blangko itu sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk mencetak e-KTP bagi warga yang memegang suket sebanyak 3.500. Namun warga pemilik suket harus datang langsung ke kecamatan untuk mencetak e-KTP. Tidak semua data pemegang suket dicetak e-KTP, karena dikhawatirkan

tidak diambil karena sudah pindah penduduk atau faktor lainya. "Jadi pencetakan KTP elektronik berdasarkan permohonan. Harus dari warga pemilik suket karena untuk memastikan penerima KTP elektronik benar-benar yang bersangkutan," paparnya.

Dia menegaskan dengan ketersediaan blangko yang mencukupi itu, kebijakan pencetakan e-KTP secara terbatas tidak berlaku. Sebelumnya pencetakan e-KTP diprioritaskan untuk wajib KTP baru atau berumur 17 tahun maupun kebutuhan mendesak.

Dindukcapil Kota Yogyakarta mencatat jumlah data kependudukan di Kota Yogyakarta yang sudah merekam data e-KTP mencapai sekitar 99,4 persen. Sisanya 0,6 persen dari KTP baru dan dimungkinkan warga yang sudah tidak lagi berada di Kota Yogyakarta.

Diakuinya untuk daerah yang memiliki anggaran cukup, bisa pengadaan sendiri caranya dengan memberikan hibah ke pusat untuk memperoleh blangko e-KTP. Tetapi, untuk Kota Yogyakarta tidak mengajukan hibah karena anggaran 2020 sudah ditetapkan. "Kami harap blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat siap sedia dan bisa memenuhi kebutuhan warga sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran dari APBD," ujar Bram.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005